



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Juni 2012

Edisi: 11 Juni 2012

Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada terdakwa Lúcia M. B. Lobato dan membebaskan terdakwa António Freitas

Pada tanggal 8 Juni 2012, Pengadilan Distrik Dili (PDD) menjalankan proses persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas dua kasus yang masing-masing dengan Nomor Perkara: 580/C.Ord/2011/TDD dan 622/C.Ord/2011/TDD. Kedua kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, maladministrasi dan tindak pidana turut serta dalam kejahatan ekonomi. Kedua kasus ini melibatkan terdakwa Lúcia M.B. Freitas Lobato selaku Menteri Kehakiman dan terdakwa António de Araújo Freitas (Direktur Prokuramen di Kementerian Kehakiman dan Team Seleksi dan Penilai Proyek Bangunan Kantor Notaris di delapan distrik) yang diduga terjadi antara tahun 2008 dan 2009.

Proses pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari Hakim Edite Palmira selaku hakim ketua, dan didampingi oleh Hakim Paulo Texeira, dan Dr. José Maria de Araújo. Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Felismino Cardoso, sementara pihak pembela diwakili oleh Sérgio Hornai dan Cançio Xavier, dari Kantor Pengacara Umum Dili.

Setelah menilai semua proses, akhirnya pengadilan menyimpulkan dan kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada terdakwa Lúcia M.B. Freitas Lobato, menghukum biaya ganti rugi kepada negara sebesar USD 4350,00 dan membayar biaya perkara sebesar USD 300,00. Sementara itu, pengadilan membebaskan terdakwa António de Araújo Freitas dari segala tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua terdakwa masing-masing dengan hukuman 12 tahun penjara untuk terdakwa Lúcia M.B. Freitas Lobato dan 9 tahun penjara untuk António Freitas.

Hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti yang dihasilkan selama proses persidangan.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa, *terlepas dari para pihak akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk melawan putusaun pengadilan tingkat pertama, namun JSMP berpandangan bahwa putusan ini menunjukkan sebuah langkah dan*

terobosan penting dan memiliki makna yang sangat berbeda dalam konteks negara paska konflik seperti halnya Timor Leste..

Melalui hakim kolektif setelah menilai semua bukti-bukti terkait yang diajukan dan diuji di pengadilan, kemudian pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menurut pasal 299 (1) KUHP mengenai tindak pidana turut serta dalam kejahatan ekonomi dengan ancaman hukum antara 2 hingga 8 tahun penjara. Sementara dakwaan lainnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumentu dan mal administrasi tidak terbukti.

Dalam kasus yang melibatkan terdakwa António Freitas, pengadilan tidak menemukan bukti-bukti yang kuat atas keterlibatannya mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen, karena para saksi yang dihadirkan menerangkan bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan dokumen kepada mereka untuk ditandatangani, terdakwa juga menyertakan dokumen yang terkait dengan proyek tender kepada mereka selaku team juri untuk dibaca sebelum mereka menandatangani. Namun merekalah yang tidak memiliki niat untuk membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani.

Sehubungan dengan jumlah uang untuk pembangunan Kantor Notaris di Distrik Lautem bernilai yang USD 200.000 bukannya tidak berkualitas sama sekali. Selain itu, menurut Undang-Undang Prokuramen tidak menentukan secara jelas standar maximum atau minimum dana yang diperlukan untuk berkompetesi dalam proyek tertentu.

Berdasarkan pemantaun JSMP selama proses persidangan awal hingga tingkat pembacaan hukuman oleh pengadilan, kasus ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat umum, media, partai politik, individu dan agen-agen internasional lainnya. Hal ini dikarenakan kasus ini merupakan kasus kedua yang melibatkan para pejabat dalam Pemerintahan Koalisi Mayoritas Parlemen (AMP). Terutama, karena kasus ini melibatkan secara langsung Menteri Kehakiman yang bertanggung-jawab dan membawahi administrasi peradilan di institusi-institusi hukum terkait di Timor Leste.

JSMP memuji dan memberikan selamat atas upaya semua komponen di institusi-institusi judicial dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini, yang menjadikan segala hal menjadi mungkin; bahwa hukum berdiri di atas semua golongan/pihak sebagaimana dalam ajaran hukuma dan amanat pasal 16 Konstitusi República Timor Leste.

Putusan ini mencerminkan komitmen pengadilan melalui para penegak hukumnya untuk mengadili kasus ini dari awal hingga putusan akhir dibacakan.

Sekali lagi, walaupun akan ada upaya hukum bading terhadap putusan ini, namun kasus ini mengesankan sebuah kenyataan yang berlawanan dengan persepsi umum masyarakat selama ini, bahwa keadilan hanya berlaku kepada kepada orang kecil dan miskin dan hukum tidak sanggup untuk menyentuh mereka yang memiliki kekuasaan baik di pemerintahan maupun di Parlemen Nasional.

Putusan ini membuka jalan ke depan dan sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi setiap warga negara, terutama bagi mereka tengah memegang kekuasaan atau bagi mereka akan memegang pemerintahan berikutnya, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, kredibel dan berwibawa untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi di masa mendatang.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883